

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) merupakan lembaga independen yang memiliki peran strategis dalam menjamin perlindungan dan pemenuhan hak anak di Indonesia. KPAI dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (KPAI, 2006, hal 1). KPAI memiliki tugas utama melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak anak di seluruh wilayah Indonesia. Dalam struktur kelembagaan negara, KPAI termasuk lembaga non-struktural yang fungsinya berbeda dengan lembaga eksekutif seperti Kementerian Sosial atau Lembaga penegak hukum seperti kepolisian. KPAI juga berbeda dari Komnas HAM yang menangani isu hak asasi manusia secara lebih umum, sedangkan KPAI berfokus pada hak anak.

Remaja merupakan kelompok yang penting dalam upaya perlindungan anak karena mereka berada pada tahap perkembangan yang rawan terhadap pelanggaran hak, baik sebagai korban maupun saksi di lingkungan sekolah atau media sosial. Meskipun keberadaan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) telah diatur secara hukum dan aktif menjalankan fungsi pengawasan serta advokasi perlindungan anak, hasil survei terbaru yang dilakukan peneliti pada 21–22 Oktober 2025 menunjukkan bahwa tingkat pemahaman remaja dan masyarakat terhadap fungsi kelembagaan KPAI masih tergolong rendah. Survei ini melibatkan 60 responden dengan komposisi: 55% pelajar SMP/SMA/ sederajat, 20% mahasiswa, 16,7% masyarakat umum, dan 8,3% siswa SD/ sederajat. Sebanyak 83,3% responden mengaku pernah mendengar tentang KPAI, namun hanya 41,7% yang mengetahui bahwa KPAI bergerak di bidang perlindungan anak.

Lebih lanjut, 50% responden masih keliru menganggap bahwa KPAI berada di bawah Kementerian Sosial, dan hanya 16,7% yang menjawab benar bahwa KPAI merupakan lembaga negara independen. Pemahaman terhadap dasar hukum pembentukan KPAI juga masih rendah, di mana hanya 21,7% responden yang

mengetahui bahwa dasar hukum tersebut tercantum dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, sedangkan 53,3% justru keliru dengan menjawab Undang-Undang Hak Asasi Manusia (HAM).

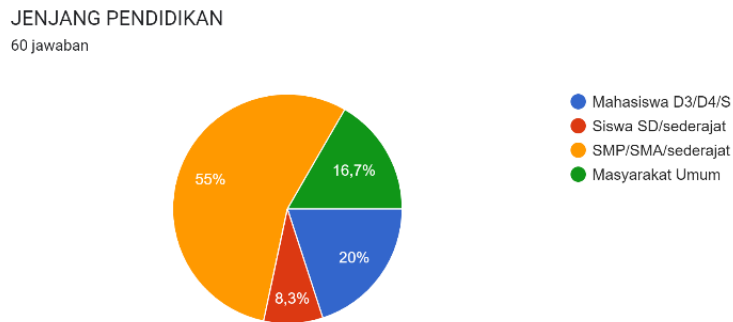
Kesalahpahaman juga tampak pada aspek tugas dan fungsi KPAI. Sebanyak 58,3% responden beranggapan bahwa hanya orang tua yang dapat menyampaikan laporan ke KPAI, padahal lembaga ini juga menerima laporan dari anak dan remaja. Selain itu, 50% responden mengira kegiatan utama KPAI adalah membuat kebijakan pendidikan, sementara hanya 11,7% yang menjawab benar bahwa KPAI berfokus pada pengawasan dan perlindungan hak anak. Tidak hanya itu, 61,7% responden berasumsi bahwa KPAI dapat menghukum langsung pelaku kekerasan terhadap anak, menunjukkan masih rendahnya pemahaman publik mengenai fungsi koordinatif dan advokatif lembaga ini.

Temuan ini menegaskan adanya kesenjangan informasi dan literasi kelembagaan, khususnya di kalangan remaja. Sebanyak 63,3% responden mengaku tidak mengetahui bahwa KPAI memiliki alur khusus dalam menangani laporan, sementara 50% lainnya masih menganggap KPAI menangani semua kasus anak tanpa batasan fungsi. Di sisi lain, 66,7% responden menyatakan bahwa media seperti *e-booklet* merupakan sarana yang mudah diakses dan efektif untuk memahami ruang lingkup kerja KPAI. Bahkan, 68,3% responden mengaku bersedia membaca dan melihat *e-booklet* panduan KPAI apabila tersedia secara gratis, menarik, dan mudah diakses.

Hasil survei tersebut menunjukkan bahwa meskipun sebagian besar remaja telah mengenal nama KPAI, mereka belum memahami secara utuh kedudukan, peran, serta fungsi konkret lembaga ini dalam kehidupan sehari-hari. Kondisi ini menjadi dasar urgensi pengembangan *e-booklet company profile* KPAI sebagai media informasi dan hubungan masyarakat (*public relations*) yang dikemas secara visual, komunikatif, dan ramah remaja. Media ini diharapkan dapat menjadi jembatan antara lembaga dan generasi muda dalam meningkatkan kesadaran serta

partisipasi remaja terhadap isu perlindungan anak di lingkungan sekolah dan masyarakat.

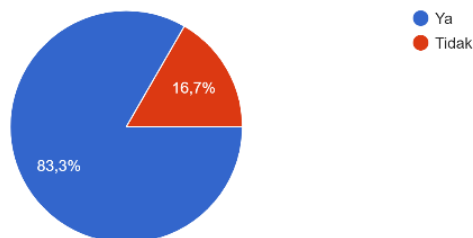
a) Hasil Pre-Test



Gambar 1. 1 Hasil Pre-Test pertanyaan 1

Berdasarkan hasil pre-test yang diikuti oleh 60 responden, mayoritas responden berasal dari jenjang SMP/SMA/ sederajat, yaitu sebanyak 55% atau 33 responden. Selanjutnya, 20% atau 12 responden merupakan mahasiswa, 16,7% atau 10 responden berasal dari masyarakat umum, dan 8,3% atau 5 responden berasal dari jenjang SD/ sederajat. Hasil tersebut menunjukkan bahwa responden dalam penelitian ini didominasi oleh kelompok remaja usia sekolah menengah, yang sejalan dengan target audiens utama *e-booklet* yang dikembangkan. Dengan demikian, karakteristik responden dinilai telah sesuai untuk memberikan gambaran mengenai tingkat pemahaman remaja terhadap tugas dan fungsi Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) sebelum diberikan intervensi melalui *e-booklet*.

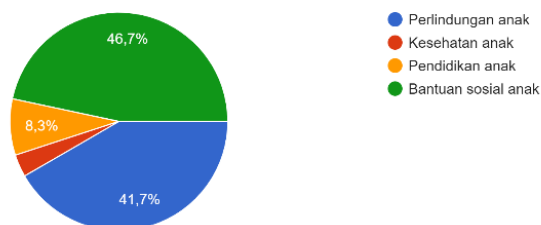
Apakah kamu pernah mendengar tentang KPAI sebelumnya?
60 jawaban



Gambar 1. 2 Hasil Pre-Test pertanyaan 2

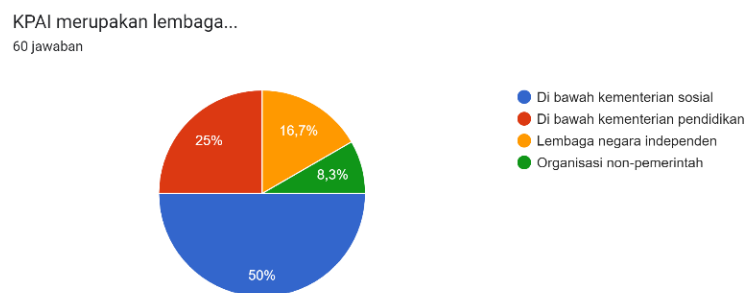
Berdasarkan hasil pre-test terhadap 60 responden, sebanyak 83,3% atau 50 responden menyatakan pernah mendengar tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), sedangkan 16,7% atau 10 responden menyatakan belum pernah mendengar tentang KPAI. Hasil tersebut menunjukkan bahwa meskipun sebagian besar responden telah mengenal nama KPAI, masih terdapat sebagian responden yang belum mengetahui keberadaan lembaga tersebut. Temuan ini mengindikasikan bahwa pengenalan terhadap KPAI sudah cukup luas, namun belum menjamin bahwa masyarakat, khususnya remaja, memiliki pemahaman yang memadai mengenai tugas, fungsi, dan peran KPAI. Oleh karena itu, diperlukan media edukasi yang mampu memberikan informasi secara lebih komprehensif dan mudah dipahami mengenai ruang lingkup kerja KPAI.

Menurut kamu, KPAI adalah lembaga yang bergerak di bidang apa?
60 jawaban



Gambar 1. 3 Hasil Pre-Test pertanyaan 3

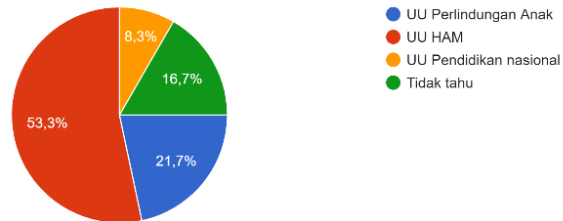
Berdasarkan hasil pre-test terhadap 60 responden, hanya 41,7% atau 25 responden yang menjawab dengan benar bahwa KPAI merupakan lembaga yang bergerak di bidang perlindungan anak. Sementara itu, 58,3% atau 35 responden memberikan jawaban yang kurang tepat. Hasil ini menunjukkan bahwa pemahaman responden mengenai ruang lingkup kerja KPAI masih tergolong rendah. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa sebagian besar responden belum memahami secara tepat fungsi dasar KPAI sebagai lembaga yang berfokus pada perlindungan anak. Oleh karena itu, diperlukan media edukasi yang mampu memperkenalkan peran dan fungsi KPAI secara lebih jelas, menarik, dan mudah dipahami oleh remaja sebagai target audiens.



Gambar 1. 4 Hasil Pre-Test pertanyaan 4

Berdasarkan hasil pre-test terhadap 60 responden, sebanyak 50% atau 30 responden masih keliru menjawab bahwa KPAI merupakan lembaga yang berada di bawah Kementerian Sosial. Sementara itu, hanya 16,7% atau 10 responden yang menjawab dengan benar bahwa KPAI adalah lembaga negara independen. Hasil tersebut menunjukkan bahwa masih banyak responden yang belum memahami kedudukan kelembagaan KPAI dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Kesalahan persepsi ini mengindikasikan adanya kebutuhan akan media informasi yang dapat menjelaskan status kelembagaan KPAI secara jelas dan mudah dipahami, sehingga masyarakat, khususnya remaja, tidak lagi menyamakan KPAI dengan kementerian atau lembaga pemerintah lainnya.

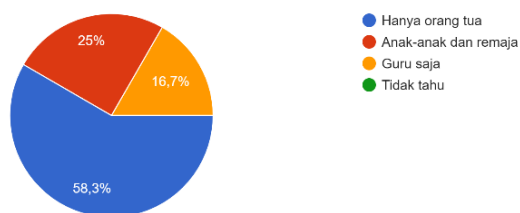
Dasar hukum pembentukan KPAI terdapat dalam...
60 jawaban



Gambar 1. 5 Hasil Pre-Test pertanyaan 5

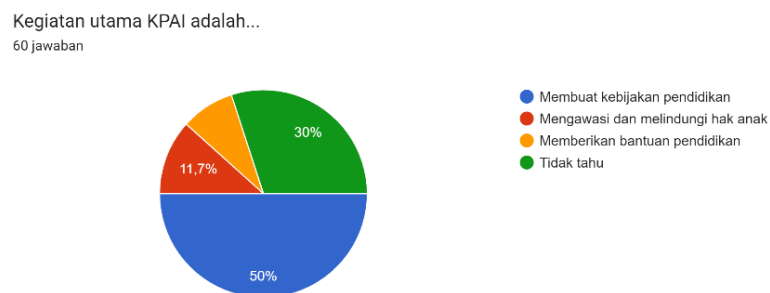
Berdasarkan hasil pre-test terhadap 60 responden, hanya 21,7% atau 13 responden yang menjawab dengan benar bahwa dasar hukum pembentukan KPAI terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Sebaliknya, sebanyak 53,3% atau 32 responden masih keliru dengan menjawab bahwa dasar hukum pembentukan KPAI terdapat dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia (UU HAM). Hasil tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar responden belum memahami landasan hukum pembentukan KPAI secara tepat. Temuan ini mengindikasikan bahwa informasi mengenai kedudukan dan dasar hukum KPAI masih belum banyak diketahui oleh masyarakat, khususnya remaja. Oleh karena itu, diperlukan media edukasi yang dapat menyampaikan informasi kelembagaan secara jelas, akurat, dan mudah dipahami sehingga dapat meningkatkan pemahaman responden mengenai dasar hukum pembentukan KPAI.

Siapa yang dapat meminta bantuan atau menyampaikan laporan kepada KPAI?
60 jawaban



Gambar 1. 6 Hasil Pre-Test pertanyaan 6

Berdasarkan hasil pre-test terhadap 60 responden, sebanyak 58,3% atau 35 responden masih beranggapan bahwa permintaan bantuan atau penyampaian laporan kepada KPAI hanya dapat dilakukan oleh orang tua. Padahal, KPAI menerima pengaduan dari siapa pun, termasuk anak dan remaja yang mengalami, menyaksikan, atau mengetahui adanya dugaan pelanggaran hak anak. Hasil tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar responden masih memiliki pemahaman yang kurang tepat mengenai mekanisme pengaduan di KPAI. Temuan ini mengindikasikan perlunya media edukasi yang dapat memberikan informasi secara jelas mengenai layanan pengaduan KPAI, sehingga remaja memahami bahwa mereka juga memiliki hak dan kesempatan untuk melaporkan kasus pelanggaran hak anak sesuai dengan prosedur yang berlaku.



Gambar 1. 7 Hasil Pre-Test pertanyaan 7

Berdasarkan hasil pre-test terhadap 60 responden, sebanyak 50% atau 30 responden masih beranggapan bahwa kegiatan utama KPAI adalah membuat kebijakan pendidikan, sedangkan 30% atau 18 responden menyatakan tidak mengetahui tugas utama KPAI. Hanya 11,7% atau 7 responden yang menjawab dengan benar bahwa kegiatan utama KPAI adalah mengawasi pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak anak. Hasil tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar responden masih memiliki pemahaman yang kurang tepat mengenai tugas dan fungsi KPAI. Rendahnya persentase jawaban benar mengindikasikan bahwa peran KPAI sebagai lembaga pengawas perlindungan anak belum dipahami secara baik

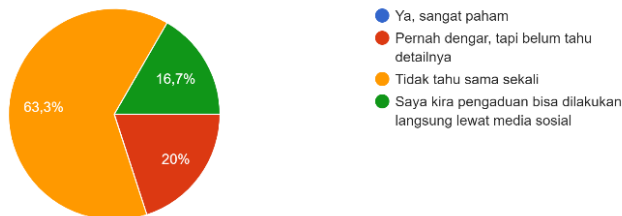
oleh masyarakat, khususnya remaja. Temuan ini memperkuat perlunya media edukasi yang mampu menjelaskan tugas dan fungsi KPAI secara jelas, menarik, dan mudah dipahami agar tidak terjadi kesalahpahaman mengenai ruang lingkup kewenangan lembaga tersebut.



Gambar 1. 8 Hasil Pre-Test pertanyaan 8

Berdasarkan hasil pre-test terhadap 60 responden, sebanyak 61,7% atau 37 responden masih beranggapan bahwa KPAI memiliki kewenangan untuk menghukum atau menindak secara langsung pelaku kekerasan terhadap anak. Hasil tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar responden belum memahami batas kewenangan KPAI sebagai lembaga negara independen. Pada kenyataannya, KPAI berperan dalam melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan anak, menerima dan menelaah pengaduan, memberikan rekomendasi kepada instansi terkait, serta melakukan advokasi, namun tidak memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi atau menghukum pelaku secara langsung. Temuan ini menunjukkan masih adanya kesalahpahaman mengenai fungsi dan kewenangan KPAI, sehingga diperlukan media edukasi yang mampu menjelaskan peran KPAI secara lebih akurat agar masyarakat, khususnya remaja, memiliki pemahaman yang benar mengenai ruang lingkup tugas lembaga tersebut.

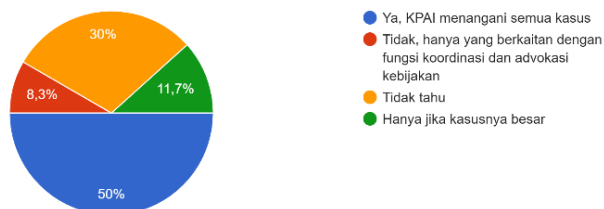
Apakah Anda mengetahui bahwa KPAI memiliki alur khusus dalam menangani pengaduan?
60 jawaban



Gambar 1. 9 Hasil Pre-Test pertanyaan 9

Berdasarkan hasil pre-test terhadap 60 responden, sebanyak 63,3% atau 38 responden menyatakan tidak mengetahui bahwa KPAI memiliki alur khusus dalam menangani pengaduan, sedangkan 20% atau 12 responden menyatakan pernah mendengar mengenai alur pengaduan KPAI, namun belum mengetahui secara rinci. Hasil tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar responden masih memiliki pengetahuan yang terbatas mengenai mekanisme pengaduan di KPAI. Temuan ini mengindikasikan bahwa informasi mengenai prosedur pelaporan pelanggaran hak anak belum tersosialisasikan secara optimal kepada masyarakat, khususnya remaja. Oleh karena itu, diperlukan media edukasi yang mampu menjelaskan alur pengaduan KPAI secara sistematis dan mudah dipahami agar remaja mengetahui langkah-langkah yang dapat dilakukan ketika menghadapi atau menyaksikan pelanggaran hak anak.

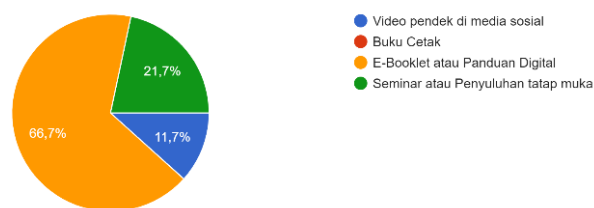
Apakah semua laporan kasus anak bisa langsung ditangani oleh KPAI?
60 jawaban



Gambar 1. 10 Hasil Pre-Test pertanyaan 10

Berdasarkan hasil pre-test terhadap 60 responden, sebanyak 50% atau 30 responden beranggapan bahwa KPAI menangani semua jenis kasus yang terjadi di masyarakat, sedangkan 30% atau 18 responden menyatakan tidak mengetahui ruang lingkup penanganan kasus oleh KPAI. Hanya 8,3% atau 5 responden yang menjawab dengan benar bahwa KPAI menangani permasalahan yang berkaitan dengan perlindungan anak melalui fungsi pengawasan, koordinasi, advokasi kebijakan, serta pemberian rekomendasi kepada instansi terkait. Hasil tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar responden masih memiliki persepsi yang kurang tepat mengenai kewenangan KPAI. Temuan ini mengindikasikan bahwa masih banyak masyarakat, khususnya remaja, yang menganggap KPAI sebagai lembaga yang dapat menangani seluruh jenis perkara secara langsung, padahal kewenangan KPAI terbatas pada isu-isu yang berkaitan dengan perlindungan anak sesuai dengan tugas dan fungsinya. Oleh karena itu, diperlukan media edukasi yang dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai ruang lingkup kewenangan KPAI agar tidak terjadi kesalahpahaman di masyarakat.

Menurut Anda, media seperti apa yang paling mudah diakses untuk memahami ruang lingkup KPAI?
60 jawaban

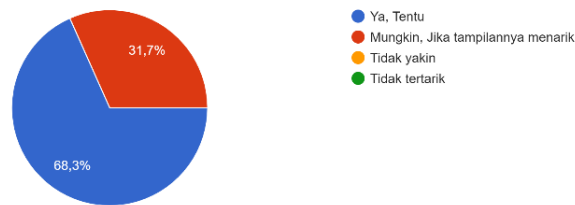


Gambar 1. 11 Hasil Pre-Test pertanyaan 11

Berdasarkan hasil pre-test terhadap 60 responden, sebanyak 66,7% atau 40 responden menyatakan bahwa media *e-booklet* yang mudah diakses merupakan media yang mereka butuhkan untuk memahami ruang lingkup kerja KPAI. Hasil tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar responden memiliki preferensi terhadap media edukasi digital yang dapat diakses secara praktis kapan saja dan di mana saja. Temuan ini memperkuat bahwa

pengembangan *e-booklet* sebagai media *public relations* KPAI sesuai dengan kebutuhan informasi audiens, khususnya remaja yang terbiasa memperoleh informasi melalui media digital. Oleh karena itu, *e-booklet* dipandang sebagai media yang tepat untuk menyampaikan informasi mengenai profil, tugas, fungsi, serta layanan KPAI secara lebih menarik, sistematis, dan mudah dipahami.

Apakah Anda bersedia membaca e-booklet panduan KPAI jika tersedia secara gratis dan mudah diakses?
60 jawaban



Gambar 1. 12 Hasil Pre-Test pertanyaan 12

Berdasarkan hasil pre-test terhadap 60 responden, sebanyak 68,3% atau 41 responden menyatakan bersedia membaca *e-booklet* panduan KPAI apabila tersedia secara gratis, mudah diakses, dan memiliki tampilan yang menarik. Hasil tersebut menunjukkan bahwa mayoritas responden memiliki minat yang tinggi terhadap media edukasi digital yang praktis dan disajikan dengan desain visual yang menarik. Temuan ini mengindikasikan bahwa kemudahan akses dan kualitas tampilan menjadi faktor penting yang memengaruhi ketertarikan remaja dalam membaca materi edukasi. Oleh karena itu, pengembangan *e-booklet* dengan desain yang komunikatif dan mudah diakses dinilai sesuai dengan preferensi audiens serta berpotensi menjadi media *public relations* yang efektif untuk memperkenalkan ruang lingkup kerja KPAI kepada remaja.

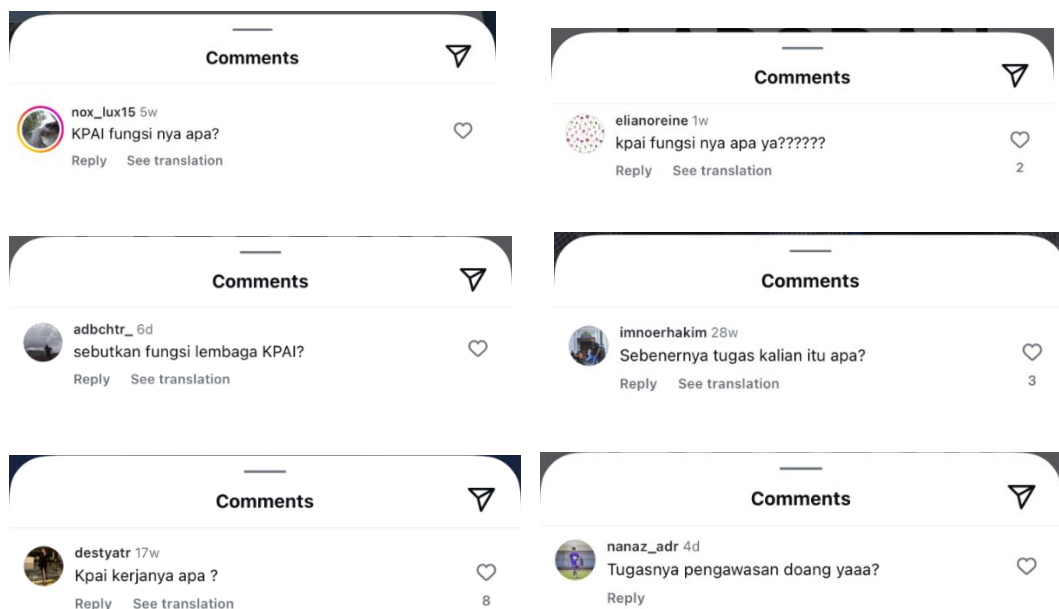
Kondisi ini menunjukkan bahwa edukasi kelembagaan tidak hanya dibutuhkan oleh mereka yang sudah atau sedang menghadapi persoalan terkait anak, tetapi juga penting sebagai upaya preventif agar remaja memahami

kedudukan tugas dan fungsi KPAI secara tepat. Meningkatkan literasi generasi muda mengenai tugas dan fungsi KPAI merupakan bagian dari upaya memperkuat keterlibatan publik dalam sistem perlindungan anak.

Pengembangan media *e-booklet* didasarkan pada kebutuhan KPAI dan sebanyak 60 responden untuk memiliki media *public relations* yang dapat digunakan secara berkelanjutan dalam kegiatan sosialisasi. Selama ini, informasi mengenai KPAI lebih banyak disampaikan melalui media sosial dan siaran pers yang bersifat aktual dan sementara. Berdasarkan hasil diskusi dan persetujuan dengan pihak KPAI, *e-booklet* dipilih sebagai media yang mampu menyajikan informasi secara lebih lengkap, terstruktur, dan mudah diakses oleh remaja sehingga dapat meningkatkan pemahaman mengenai tugas dan fungsi KPAI. Urgensi pemilihan media *e-booklet* ini didasarkan pada kebutuhan akan media edukasi kelembagaan yang berkelanjutan, sistematis, dan mudah diakses. Meskipun KPAI sudah aktif melakukan sosialisasi melalui media sosial dan kegiatan tematik, pola komunikasinya masih bersifat *momentum based* hanya ramai saat isu tertentu muncul. *E-booklet* menawarkan bentuk komunikasi yang lebih mendalam, terstruktur, dan bisa dipelajari ulang kapan saja.

Berbeda dengan postingan media sosial yang cepat berganti dan mudah tenggelam oleh algoritma, *E-booklet* ini akan memperkenalkan identitas, struktur, tugas, fungsi, serta contoh peran KPAI dalam kehidupan remaja, termasuk tips memahami hak anak di sekolah, pencegahan perundungan, dan kapan perlu meminta perlindungan. Media ini dirancang sebagai bagian dari strategi komunikasi publik KPAI agar generasi muda lebih mengenal lembaga ini sejak dini, bukan hanya ketika menghadapi kasus. *E-booklet* memungkinkan remaja memahami peran dan fungsi KPAI secara utuh dalam satu narasi berkesinambungan. Selain itu, *e-booklet* dapat digunakan lintas kanal bisa dibaca *online* melalui *website/platform* media sosial KPAI, dibagikan via *Whatsapp*, atau bahkan dicetak ulang untuk kegiatan tatap muka. Jadi, pemilihan *e-booklet* bukan hanya soal format, tetapi strategi untuk menciptakan media edukasi jangka panjang yang fleksibel.

KPAI telah menjalankan berbagai upaya sosialisasi secara daring, tetapi masih ada beberapa tanggapan dan komentar di media sosial yang menunjukkan bahwa masih banyak yang belum sepenuhnya memahami apa sebenarnya tugas dan fungsi KPAI. Fenomena ini tampak dalam interaksi publik di kolom komentar akun resmi *Instagram* KPAI (@kpai_official), di mana masih sering melontarkan pertanyaan yang menunjukkan kebingungan terhadap tugas dan fungsi KPAI. Beberapa komentar yang muncul antara lain:



Gambar 1. 13 Beberapa bukti komentar masyarakat tentang tugas dan fungsi KPAI

sumber: https://www.instagram.com/kpai_official

Beberapa komentar tersebut yang berasal dari postingan *Instagram* KPAI (@kpai_official) menjadi bukti bahwa masih terdapat celah informasi yang perlu dijembatani. Ini menunjukkan bahwa meskipun KPAI sudah hadir secara digital, masyarakat terutamanya remaja masih memerlukan panduan yang jelas dan mudah dipahami tentang apa itu KPAI, apa saja tugas dan fungsinya.

KPAI telah melakukan berbagai upaya edukasi publik, baik secara daring maupun luring. Melalui daring, KPAI telah meluncurkan aplikasi “Perlindungan

Anak” bekerja sama dengan Pandawa Care, yang menyediakan fitur pelaporan, konseling, dan tombol panik untuk darurat anak. Selain itu, kampanye digital bertema *#NoJusticeInPain* juga dijalankan untuk mengedukasi publik mengenai kekerasan dan eksploitasi terhadap anak.

KPAI juga kerap merilis siaran pers dan mengadakan konferensi pers (termasuk kolaborasi dengan Bawaslu, KPU, Kemendikbud) secara daring, misalnya terkait kampanye Pemilu Ramah Anak, pencegahan kekerasan dalam kampanye politik, dan menanggapi isu kekerasan di media sosial.

Di ranah luring, KPAI aktif melakukan audiensi, forum diskusi kelompok (*FGD*), dan roadshow ke berbagai daerah, termasuk penyelenggaraan agenda tahunan seperti RAKORNAS (Rapat Koordinasi Nasional) KPAI yang dilakukan secara daring & luring melibatkan KPAD beserta *stakeholders* KPAI se-Indonesia. Kegiatan ini bertujuan untuk menyampaikan hasil pengawasan tematik dan mendorong regulasi yang ramah anak, seperti perlindungan terhadap pekerja anak dan anak korban kejahatan digital. Namun, berbagai kegiatan ini cenderung bersifat tematik dan momentum, serta belum sepenuhnya mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Selain itu konten edukatif yang telah disampaikan melalui media sosial KPAI seringkali tenggelam di antara arus informasi yang cepat berubah dan tidak tersimpan secara sistematis. Hal ini diperkuat oleh temuan bahwa pengelolaan arsip dan dokumentasi kelembagaan KPAI “masih dalam proses peningkatan,” meskipun sudah ada *workshop* kearsipan hasil kerja sama dengan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) pada Februari 2024 (KPAI, 2024). Oleh karena itu, dibutuhkan media edukatif yang berkelanjutan, mudah dipahami dan dapat diakses secara luas untuk memperkuat efektivitas komunikasi publik..

Salah satu alternatif media yang dapat digunakan adalah *company profile* berupa *E-booklet* edukatif. *E-booklet* dinilai lebih efektif untuk menyampaikan informasi secara ringkas, visual, dan komunikatif. *E-booklet* juga mudah diakses dan dapat digunakan secara berulang dalam berbagai kegiatan sosialisasi.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penulisan ini bertujuan untuk merancang dan memproduksi media *company profile* berupa *E-booklet* sebagai upaya

memperkenalkan mengenai ruang lingkup KPAI kepada remaja. Harapannya media ini dapat menjadi solusi strategis dalam menyampaikan ruang lingkup KPAI serta memperkuat peran kelembagaan KPAI dalam perlindungan anak di Indonesia. Dengan pendekatan ini, *E-booklet* bukan hanya sekadar media informasi, tetapi juga bagian dari strategi komunikasi publik KPAI agar generasi muda lebih mengenal lembaga ini sejak dini, bukan hanya ketika menghadapi kasus.

Untuk mengatasi keterbatasan media digital sebagai salah satu kelemahan (weakness) dalam analisis SWOT pada tabel 1.1, dilakukan strategi mitigasi melalui distribusi *e-booklet* pada berbagai kanal komunikasi resmi KPAI. *E-booklet* dalam format PDF dipublikasikan melalui website dan media sosial KPAI serta dapat diakses melalui tautan maupun QR Code. Strategi ini bertujuan untuk mempermudah remaja dalam mengakses informasi mengenai KPAI melalui platform digital yang telah akrab digunakan dalam kehidupan sehari-hari.

Dengan demikian, penting bagi KPAI untuk mengembangkan strategi komunikasi publik yang sistematis dan berbasis media edukatif agar remaja dapat memahami ruang lingkup KPAI secara utuh dan tepat. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas layanan aduan, memperkuat perlindungan anak. Selain itu remaja bisa mengetahui kapan dan dalam situasi apa mereka perlu menghubungi KPAI, dan juga mengedukasi lingkungan sekitar seperti keluarga, sekolah, atau komunitas tentang pentingnya perlindungan anak dan lembaga yang berwenang di bidang itu.

Oleh karena itu, dilakukan pemetaan melalui pendekatan SWOT yang menggambarkan posisi karya ini. Berikut adalah analisis SWOT:

Tabel 1. 1 Analisis SWOT

<i>Strengths (kekuatan)</i>	<i>Weaknesses (kelemahan)</i>
<ul style="list-style-type: none"> • <i>E-booklet</i> memiliki jangkauan luas, sehingga mudah diakses melalui gawai dan tidak terbatas oleh distribusi cetak fisik 	<ul style="list-style-type: none"> • Ketergantungan pada perangkat digital dan akses internet untuk mengakses <i>e-booklet</i>. menjadi salah satu kendala dan

<ul style="list-style-type: none"> • Dengan format digital memungkinkan pengayaan konten visual interaktif seperti tautan, ikon klik, ilustrasi beranimasi atau infografik responsif. • <i>E-booklet</i> dirancang dengan prinsip desain grafis edukatif, menjadikannya lebih menarik, komunikatif dan mudah dipahami oleh remaja. 	<p>pemanfaatan <i>e-booklet</i> secara optimal.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Risiko keterbatasan perhatian pengguna karena media digital akan bersaing dengan banyak konten lain (media sosial, iklan, video). • Membutuhkan desain yang sangat adaptif dan ringan agar tidak menyulitkan pengguna saat mengakses.
<p><i>Opportunities</i> (peluang)</p>	<p><i>Threats</i> (ancaman)</p>
<ul style="list-style-type: none"> • <i>E-booklet</i> dapat disebarluaskan secara masif melalui kanal resmi KPAI, seperti <i>website</i>, media sosial atau platform mitra KPAI. • Dapat digunakan sebagai materi digital dalam pelatihan, seminar, atau edukasi daring oleh berbagai pemangku kepentingan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Persaingan dengan berbagai konten digital berdurasi singkat di media sosial (seperti TikTok, Reels) dapat mengurangi perhatian remaja terhadap media edukasi berbentuk <i>e-booklet</i>. • Potensi tumpang tindih informasi dari berbagai sumber tidak resmi dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap isi <i>e-booklet</i> • Perubahan kebijakan KPAI atau sistem pelaporan dapat membuat informasi dalam <i>e-booklet</i> cepat kedaluwarsa jika tidak dikelola pembaruannya secara berkala.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah dalam pengkaryaan ini adalah permasalahan rendahnya pemahaman remaja mengenai tugas dan fungsi Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Oleh karena itu, pengkaryaan ini berfokus pada perancangan dan produksi media *company profile* berupa e-booklet yang informatif, menarik, dan sesuai dengan karakteristik remaja sebagai media *public relations* untuk memperkenalkan ruang lingkup kerja KPAI serta meningkatkan pemahaman remaja mengenai tugas dan fungsi KPAI.

1.3 Tujuan

Tujuan dilakukan pengkaryaan ini adalah untuk memberikan edukasi kepada remaja melalui perancangan *company profile* berupa *e-booklet* yang menyajikan informasi secara ringkas, jelas, dan terstruktur menampilkan identitas, visi-misi, struktur organisasi, serta tugas dan fungsi KPAI dalam konteks perlindungan anak, Menyajikan konten yang disesuaikan dengan gaya komunikasi dan kebutuhan informasi remaja, dan menjadikan *e-booklet* ini sebagai alat komunikasi PR KPAI yang dapat digunakan dalam kegiatan sosialisasi di sekolah dan platform digital.

1.4 Manfaat

Manfaat yang dapat diperoleh dari pengkaryaan tugas akhir ini yang dapat diperoleh yaitu:

1. Bagi Mahasiswa

Pengkaryaan ini memberikan pengalaman langsung kepada mahasiswa dalam menerapkan teori-teori Hubungan masyarakat, Melalui proses perancangan dan pengembangan media edukatif, mahasiswa dapat meningkatkan keterampilan riset terapan, kemampuan desain tugas dan fungsi, serta sensitivitas terhadap isu kelembagaan dan sosial. Pengkaryaan ini juga menjadi sarana aktualisasi akademik dalam menjawab persoalan komunikasi kelembagaan yang berdampak luas.

2. Bagi KPAI

Hasil pengkaryaan ini dapat dimanfaatkan oleh KPAI sebagai media edukasi berkelanjutan yang dapat digunakan dalam kegiatan sosialisasi, penyuluhan,

maupun diseminasi informasi kepada remaja. *E-booklet* yang dikembangkan tidak hanya menyajikan informasi secara komunikatif dan visual, tetapi juga dirancang berdasarkan kebutuhan remaja dan data faktual. Media ini diharapkan dapat menjadi media PR modern yang efektif memperkenalkan lembaga kepada generasi muda.

3. Bagi Program Studi

Pengkaryaan ini memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian komunikasi kelembagaan dan media edukatif berbasis cetak. Selain itu, pengkaryaan ini dapat menjadi contoh riset terapan berbasis kebutuhan sosial dan lembaga, sehingga memperkaya portofolio keilmuan Program Studi Informasi dan Humas. Pengkaryaan ini juga memperlihatkan peran mahasiswa prodi ini sebagai penghubung antara lembaga negara dan remaja melalui desain pesan dan media yang tepat sasaran.

4. Bagi Remaja

E-booklet yang dihasilkan dari pengkaryaan ini diharapkan dapat meningkatkan literasi kelembagaan pada remaja, khususnya dalam memahami tugas dan fungsi KPAI. Dengan informasi yang disajikan secara sederhana dan mudah diakses, remaja diharapkan menjadi lebih sadar akan keberadaan lembaga negara yang berfokus pada perlindungan hak-hak anak dan menumbuhkan kesadaran akan pemahaman tentang hak anak serta lembaga yang melindunginya. Dalam jangka panjang, media ini dapat mendukung terciptanya sistem perlindungan anak yang lebih kuat, partisipatif, dan responsif terhadap kebutuhan remaja.

1.5 Luaran

Luaran dari projek tugas akhir ini adalah *e-booklet company profile* produksi media *public relations* compnaberupa *e-booklet* edukasi dengan judul “**Kenali KPAI: Panduan memahami Tugas dan Fungsi KPAI**”